



Tersisa 57,14 Hektare Kawasan Kumuh

■ Pemkot Yogya Gelontorkan Rp13,19 M untuk Penataan Terban

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta masih memiliki pekerjaan rumah (PR) untuk menata kawasan kumuh di wilayahnya. Hingga saat ini, tersisa sekitar 57,14 hektare yang harus diselesaikan hingga 2031.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta, Umi Akhsanti, mengatakan, amanat itu tertuang dalam SK Wali Kota Yogya No 158 Tahun 2021. Saat SK tersebut diterbitkan, luasan kawasan kumuh di Kota Yogya masih di angka 80,94 hektare dan harus dituntaskan dalam 10 tahun.

"Sejauh ini Pemkot Yogya sudah mengurangi 23,80 hektare kawasan kumuh, sehingga masih menyisakan 57,14 hektare," jelasnya, Kamis (16/1).

Oleh sebab itu, sepanjang 2025, Pemkot Yogya kembali melangsungkan penataan kawasan kumuh, dengan menasar beberapa titik sekaligus. Dalam melakukan penataan, pihaknya tidak sebatas menasar hunian warga, namun juga beberapa parameter lain, agar status kawasan kumuh benar-benar terentaskan.

"Seperti pembangunan jalan, saluran air minum, drainase, pengelolaan limbah, serta pembangunan proteksi kebakaran," jelasnya.

PEKERJAAN RUMAH

- Pemkot Yogyakarta masih memiliki PR untuk menata kawasan kumuh di wilayahnya.
- Hingga saat ini, tersisa sekitar 57,14 hektare yang harus diselesaikan hingga 2031.
- Sejauh ini Pemkot Yogya sudah mengurangi 23,80 hektare kawasan kumuh.
- Penataan dilakukan dengan mengungkap konsep perumahan dan permukiman layak huni (Mahananni).

Rumah deret

Adapun, penataan kawasan kumuh di Kota Yogya terus dilanjutkan dengan mengungkap konsep perumahan dan permukiman layak huni (Mahananni). Nantinya, kawasan kumuh di RT 02 RW 01 Terban, Kemantren Gondokusuman, yang berlokasi di bantaran Sungai Code, diduplik menjadi *pilot project* konsep tersebut.

Melalui konsep itu, hunian warga yang sebelumnya tersebar tidak beraturan di bantaran, ditata menjauh dari sungai dengan dibangun rumah deret.

Umi Akhsanti, mengatakan, penataan kawasan kumuh di Terban menasar lahan selu-

as sekitar 2 hektare. Terdapat 22 Kepala Keluarga (KK) yang menempati rumah baru hasil penataan yang juga dibarengi dengan revitalisasi talud, hingga saluran sanitasi.

"Mahananni ini menggunakan konsep konsolidasi lahan. Tidak sekedar murdur. Jadi, secara prinsip, sebelumnya masyarakat punya rumah sampai bawah. Kemudian kita berembuk dengan warga dan gampang ditata," katanya.

Umi pun memaparkan, total anggaran untuk penataan permukiman kawasan kumuh di Terban mencapai sekitar Rp13,19 miliar. Anggaran tersebut, berasal dari APBD Kota Yogyakarta Rp9,2 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN sekitar Rp3,9 miliar.

"Kita keroyokan anggaran dengan DAK dan APBD. Kelebihan di sini tanahnya adalah *Sultan Ground*, sehingga lebih mudah dalam penataan kawasan menjadi lebih baik. Ini belum selesai, di bagian bawah masih berupa tanah ini akan kita selesaikan lewat TMMD 2025," ujarnya.

Apresiasi

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Yogya, Sugeng Purwanto, mengapresiasi hasil penataan kawasan kumuh yang dilakukan di seputaran Terban. Ia juga menyebut, para pengguna bangunan rumah juga telah berbesar hati karena penataan ini terbilang mengurugi luasan sebelumnya.

Tetapi, pemerintah menatanya dengan dibuat bangunan dua lantai, sebagai kompensasi luasan bangunan saat masih satu lantai. "Marwah dari kegiatan ini yang pasti adalah penataan lingkungan. Ini juga bentuk kepedulian dari pemerintah untuk memberikan stimulan bantuan berwujud perumahan yang sudah tertata, yang harapannya memberikan kenyamanan bagi pemiliknya," pungkas Sugeng. (aka)



DOK. DINAS PUPKP KOTA YOGYA

KONSEP MAHANANNI - Hasil penataan kawasan kumuh dengan konsep "Mahananni", di Terban, Gondokusuman, Kota Yogya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005